

## BAB V KESIMPULAN

Ancaman perubahan iklim yang semakin nyata mendorong komunitas global untuk melakukan upaya bersama untuk mencegah dan memeranginya. Awal tahun 1990-an menjadi tonggak munculnya rezim perubahan iklim global yang ditandai dengan terbentuknya UNFCCC pada tahun 1992. Pembentukan kerangka kerja PBB ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pelaksanaan negosiasi antara negara-negara di dunia untuk menyepakati mekanisme pencegahan dan penanganan perubahan iklim. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim adalah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh maraknya pembangunan dan industrialisasi di negara-negara maju. Selain itu pemakaian bahan bakar fosil, pemakaian sumber daya alam yang berlebihan dan penebangan liar hutan merupakan sumber utama emisi.

Dalam perundingan perubahan iklim tahun 1997 negara-negara menyepakati membentuk mekanisme Protokol Kyoto sebagai mekanisme mengikat (*legally binding*) untuk melakukan pengurangan emisi gas rumah kaca. Mekanisme ini pada perkembangannya tidak dapat berjalan efektif karena terdapat pertentangan negara maju dan negara berkembang. Negara berkembang menuntut negara maju yang secara historis telah lebih dulu mengemisi dunia dengan jumlah yang sangat besar, untuk terlebih dahulu melakukan pengurangan emisi. Emisi yang telah dihasilkan negara maju selama puluhan tahun tersebut telah membawa kemajuan besar terhadap perekonomian mereka hingga seperti sekarang ini. Oleh karena itu sebagian negara maju enggan untuk melakukan pengurangan emisi. Sementara negara maju menuntut negara berkembang besar seperti China dan India yang pertumbuhan ekonominya luar biasa, untuk ikut berpartisipasi dalam kesepakatan mengikat mengenai pengurangan emisi.

Sebagai salah satu negara maju yang dituntut bertanggung jawab untuk mengurangi emisinya Jerman merespon isu perubahan iklim dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang progresif. Bersama Uni Eropa, Jerman senantiasa mengajak negara-negara maju untuk meningkatkan komitmennya terhadap mekanisme pengurangan emisi yang ditetapkan dalam Protokol Kyoto. Tidak semua negara maju merespon ancaman perubahan iklim dengan tindakan yang

sama. Amerika Serikat secara resmi menolak untuk terikat dalam mekanisme tersebut dengan alasan mengganggu kepentingan ekonominya.

Kebijakan luar negeri Jerman yang begitu aktif dan progresif mengantisipasi perubahan iklim dipengaruhi oleh kondisi domestik. Sistem politik domestik yang memberi ruang kepada semua partai politik untuk memperjuangkan gagasannya bagi kemajuan bangsa telah dimanfaatkan oleh Partai Hijau untuk mengusung isu lingkungan ke dalam ranah parlemen (*legislatif*) dan pemerintahan (*eksekutif*). Peranan Partai Hijau semakin nyata dengan masuk dalam pemerintahan koalisi hasil pemilihan umum tahun 1998 dibawah Kanselir Gerard Schroeder. Partai Hijau mendorong Jerman tampil sebagai pemimpin komunitas global dalam upaya memerangi perubahan iklim. Peranan pemerintah federal Jerman dalam memperkenalkan dan menerapkan peraturan perlindungan lingkungan dengan ketat telah diimplementasikan dengan baik berkat kerja sama dengan kalangan industri. NGO lingkungan di dalam negeri turut serta memberikan usulan-usulan kebijakan dan kritikan terhadap pemerintah federal agar tampil aktif dalam melindungi warganya serta warga dunia dari ancaman perubahan iklim.

Diantara negara maju juga terjadi pertentangan kepentingan yang tajam terkait dengan resiko ekonomi yang akan ditanggung. Sebab melakukan pengurangan emisi berarti memperlambat laju pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang telah dicapai negara-negara maju. Perundingan internasional konvensi perubahan iklim yang berlangsung setiap tahun kemudian menjadi arena pertarungan kepentingan ekonomi dan politik sesama negara maju maupun negara maju berhadapan dengan negara berkembang. Di tengah situasi yang demikian rumit Jerman tampil dengan kebijakan luar negeri yang progresif dan aktif mendesak keterlibatan serius dari negara-negara maju. Kebijakan luar negeri Jerman senantiasa mendinamisasi politik perubahan iklim global dari kebuntuan-kebuntuan politik yang mengancam bubarnya kesepakatan global mengenai upaya memerangi perubahan iklim.